



KR-Sri Warsiti

Sri Mulyani menyerahkan penghargaan kepada pemenang lomba.

Bupati Klaten Ajak Masyarakat Cegah Korupsi

KLATEN (KR) - Pemkab Klaten berkomitmen sebagai penggerak pencegahan korupsi. Hal itu diumumkan Bupati Klaten, Sri Mulyani pada acara Festival Antikorupsi 2024 di Grha Bung Karno (GBK) Klaten, yang berlangsung Rabu - Kamis (11-12/9). Festival diselenggarakan dalam rangka menyambut Hari Anti Korupsi Sedunia pada Desember mendatang.

Menurut Sri Mulyani, Festival Anti Korupsi dapat menjadi sarana efektif untuk membangun dan menguatkan budaya antikorupsi di Kabupaten Klaten. iMari seluruh masyarakat Kabupaten Klaten bergerak bersama dalam pencegahan korupsi dan menerapkan perilaku anti korupsi, katanya. Festival Anti Korupsi melibatkan semua komponen baik dari jajaran Inspektorat Kabupaten Klaten, perangkat daerah, penyelenggara layanan publik, pelajar, komunitas anti korupsi, dan masyarakat umum selaku pengguna layanan publik.

Penyelenggaraan Festival Anti Korupsi 2024 Kabupaten Klaten juga mendapatkan apresiasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Dalam festival ini, KPK RI juga menggelar sosialisasi pendidikan antikorupsi melalui bus antikorupsi.

Kegiatan bertema iMerayakan Integritas Bersinergi dan Aksi Mewujudkan Generasi Antikorupsi tersebut dimeriahkan dengan stand pameran dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Klaten.

Inspektur Daerah Kabupaten Klaten, Agus Suprpto menyampaikan, tujuan digelarnya Festival Anti Korupsi 2024 sebagai sosialisasi budaya anti korupsi sekaligus sosialisasi pelayan publik Kabupaten Klaten yang bebas korupsi, dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencegah korupsi. "Festival Anti Korupsi 2024 ini diharapkan bisa bermanfaat untuk usaha pemberantasan korupsi di Kabupaten Klaten, dapat mewujudkan Visi dan Misinya bisa tercapai, sehingga Kabupaten Klaten bisa maju, mandiri, dan sejahtera," kata Agus Suprpto.

Festival Anti Korupsi 2024 Kabupaten Klaten juga dimeriahkan berbagai lomba yang diikuti masyarakat, seperti lomba stand up comedy hingga lomba esai antikorupsi. Dalam kesempatan tersebut, turut digelar pengukuhan anggota Paskibraka Kabupaten Klaten 2024, Duta Genre Klaten 2024, Duta Pariwisata Klaten 2024, dan Putri Otonomi Indonesia 2024 sebagai Duta Anti Korupsi Kabupaten Klaten. Festival Antikorupsi 2024 juga dihadiri jajaran Forkopimda Klaten, perwakilan Inspektorat Daerah se-Solo Raya dan Direktorat Sosialisasi dan Kampanye KPK. (Sit)-d

Andika-Hendrar Hadiri Rekerabsus PDIP Wonogiri

WONOGIRI (KR) - Calon Gubernur (Cagub) dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Jateng Andika Perkasa-Hendrar Prihadi mengaku mantab berada di Solo Raya khususnya Kabupaten Wonogiri. Untuk memenangkan kontestasi Pilgub 2024, keduanya siap mengikuti arahan Ketua DPC Joko Sutopo yang dinilai sebagai komandan lapangan yang sudah teruji dan terbukti kinerjanya.

"Sebagai kader baru kami siap mengikuti jejak dan arahan Mas Jekek (sapaan akrab Joko Sutopo) selaku ketua DPC Wonogiri," ungkap Andika kepada wartawan usai mengikuti Rapat Kerja Cabang Khusus (Rakerabsus) Pilkada DPC PDI Perjuangan Wonogiri yang digelar di Gedung Sasono Mulyo, Senin (9/9) malam.

Pihaknya juga mengaku belum melakukan survei internal. Saat ini, imbuh mantan Panglima TNI itu, pihaknya fokus bertemu internal. "Kalau tidak kenal bagaimana mau sayang. Itu strategi Mas Bambang Pacul (Bambang Wuryanto, Ketua DPD PDI Perjuangan Jateng) dalam rangka memperkenalkan saya dan Mas Hendi," ujarnya. (Dsh)-d

Pemprov Jateng Integrasikan Transportasi Massal

SEMARANG (KR) - Pemprov Jateng sedang mengupayakan agar transportasi massal di wilayahnya bisa terintegrasi di 35 kabupaten/kota. Ini sebagai wujud komitmen Pemprov Jawa Tengah dalam memberikan sarana transportasi massal yang murah, nyaman, dan terintegrasi. Demikian dikatakan Sekda Jateng Sumarno, saat membuka acara 'Central Java Transport Solution Expo 2024' di Gedung Wahana Graha Dinas Perhubungan Jateng, Rabu (11/9).

Hingga 2024, Pemprov Jateng telah menyediakan sebanyak tujuh rute perjalanan Bus Rapid Trans (BRT) Jateng dengan 115 unit armada. Armada BRT tersebut terbagi untuk rute Semarang-Bawen 28 unit, Purwokerto-Purbalingga 14 unit, Semarang-Kendal 16 unit, Magelang-Purworejo 14 unit, Solo-Sragen 14 unit, Semarang-Gubug 14 unit, dan Solo-Sukoharjo-Wonogiri 15 unit.



KR-Budiono

Sekda Jateng Sumarno membuka 'Central Java Transport Solution Expo 2024' di Semarang.

Pemkab Banyumas Raih Penghargaan Wahana Tata Nugraha



KABUPATEN BANYUMAS

BANYUMAS (KR) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyumas kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional dengan meraih Penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN). Penghargaan yang diraih kali ini yaitu Penghargaan WTN dalam kategori kota sedang. Penghargaan Wahana Tata Nugraha adalah penghargaan yang diberikan kepada Pemerintah Pemkab Banyumas dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dinilai berprestasi dalam penyelenggaraan transportasi perkotaan.

Penghargaan diserahkan oleh Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi kepada Sekda Kabupaten Banyu-

mas Agus Nur Hadie, pada acara Hub Space 2024, Sabtu (7/9) lalu di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat. Menhub Budi mengatakan penghargaan ini diberikan sebagai apresiasi bagi pemerintah daerah yang telah berkontribusi dalam memberikan manfaat transportasi yang baik bagi masyarakat.

"Secara konsisten kami memberikan penghargaan Wahana Tata Nugraha suatu penghargaan prestise untuk pemerintah daerah yang telah melakukan kegiatan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat," katanya.

Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas Agus Nur Hadie, Kamis (12/9) mengatakan Pemkab Banyumas terus berkomitmen dan berupaya dalam meningkatkan layanan transportasi untuk terus mendukung mobilitas masyarakat yang memadai serta mengurangi dampak terhadap lingkungan.

"Penghargaan ini men-

jadi bukti nyata konsistensi dan komitmen Pemkab Banyumas dalam menata transportasi serta fasilitas publik yang nyaman, aman, dan tertib. Ini adalah hasil kerja keras bersama antara pemerintah, masyarakat, dan para pemangku kepentingan lainnya," kata Agus Nur HadieIa mewakili Pj Bupati Hanung Cahyo

Saputro mengucapkan selamat dan apresiasi khususnya jajaran Dinas Perhubungan bersama para pemangku kepentingan lainnya. Agus menambahkan penyerahan penghargaan WTN merupakan bagian dari peringatan Hari Perhubungan Nasional ini diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan sebagai bentuk

apresiasi terhadap daerah-daerah yang berhasil mengelola sistem transportasi publik dengan baik,

"Yang terpenting bukan hanya penghargaan, tapi yang lebih utama adalah kita bisa bersama-sama meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu-lintas secara baik," pungkasnya. (Dri)-f



KR-Istimewa

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyerahkan penghargaan kepada Sekda Kabupaten Banyumas Agus Nur Hadie.

Wajib Pajak Ranmor Diminta Penuhi Kepatuhan

SEMARANG (KR)- Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana minta kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten dan Kota di Jawa Tengan, untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Hal tersebut disampaikan Nana Sudjana melalui Sekda Jateng Sumarno saat rapat koordinasi pengelolaan keuangan bidang pendapatan di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jateng, di Semarang, Senin (9/11). Optimalisasi pajak kendaraan bermotor harus laku-

kan Bersama dengan kabupaten dan kota. Sumarno meminta semua stakeholder terkait berkolaborasi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Langkah itu sekaligus sebagai pema-nasan menjelang pemberlakuan peraturan Opsen PKB dan BBNKB pada awal Januari 2025. Pem-

berlakuan opsen PKB dan BBNKB mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemda (UU HKPD), bahwa pemda memiliki kewenangan untuk menambahkan pungutan tambahan atas PKB dan BBNKB.

Opsen PKB dan BBNKB bertujuan untuk mempercepat penerimaan PAD dari sektor pajak kendaraan bermotor bagi kabupaten/kota. Selain itu juga sebagai sinergi dalam pemungutan pajak antara provinsi dan kabupaten/kota. "Saya berharap kita berkolaborasi untuk mengejar peningkatan kepatuhan para wajib pajak yang ada di Jawa Tengah. Termasuk para camat untuk ikut berpartisipasi untuk mendorong kepatuhan wajib pajak PBB maupun PKB di wilayah masing-masing," tutur Sumarno.

Menurut Sumarno, selama ini PAD yang dikelola Provinsi maupun kabupaten/kota banyak berbasis konsumsi seperti pajak restoran, hotel, pajak membeli kendaraan, pajak bahan bakar minyak, pajak rokok, pajak air permukaan, dan sebagainya. Sedangkan pendapatan berbasis investasi masih dikelola oleh pemerintah pusat. Untuk itu daerah harus mengejar kepatuhan wajib pajak untuk meningkatkan PAD. (Bdi)-f

Generasi Z Hadapi Tantangan Manajemen Keuangan

SEMARANG (KR) - Manajemen keuangan merupakan salah satu tantangan bagi generasi Z karena pada generasi ini adanya sifat konsumtif yang kadang tidak terkendali.

"Sifat konsumtif ini diartikan sebagai sifat yang mendorong seseorang menuruti gaya hidup mewah sehingga menyebabkan pembelian berlebihan dan tidak sesuai kemampuan," ujar dua mahasiswa Manajemen Keuangan Universitas Muhammadiyah Semarang (Unimus) Nisa Amelia Wulandari dan Nairufar Rahmatika Riswandi pada diskusi terbatas di kampus setempat, Senin (9/9).

Nisa mengakui, walaupun



KR-Istimewa

Fitria

terkadang dirinya masih sempat berfokus dalam memenuhi keinginannya untuk membeli be-

berapa hal yang seharusnya dapat tidak dibeli, dirinya dapat mengendalikan diri dengan sedikit ilmu literasi keuangan yang dipelajari.

Fitria Ramadhani yang juga mahasiswa Manajemen Keuangan Universitas Muhammadiyah Semarang mengatakan bahwa Gen Z menghadapi banyak tantangan di dalam manajemen keuangan yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, ketidakpastian ekonomi, dan perubahan sosial yang cepat. Mereka juga harus menghadapi biaya hidup yang terus meningkat, ketidakpastian dalam pekerjaan, dan tekanan untuk mengikuti gaya hidup yang seringkali mahal.

"Namun, mereka juga memiliki keuntungan karena mereka memiliki akses yang luas ke teknologi yang dapat membantu mereka untuk menghemat lebih banyak uang. Mereka dapat merencanakan keuangan, menabung, dan berinvestasi dengan lebih bijak dan efisien dengan bantuan berbagai alat digital dan informasi finansial yang tersedia untuk mereka. Untuk mencapai kesuksesan, Generasi Z harus memiliki pemahaman yang kuat tentang keuangan, kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan, dan keberanian untuk memanfaatkan peluang investasi yang tersedia," ujar Fitria. (Sgi)-f



Dorong Penguatan BUMD dengan Prinsip Tata Kelola

ANGGOTA DPRD Jawa Tengah Bambang Hariyanto mengatakan, DPRD Jawa Tengah terus melakukan penguatan terhadap prinsip-prinsip pengelolaan good corporate governance (GCG) pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemprov Jateng. Ini harus dilakukan agar BUMD dapat beroperasi secara efisien, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Bambang Haryanto mengatakan hal ini kepada wartawan di Semarang, Kamis (12/9). Tata kelola perusahaan yang baik tidak sekadar konsep, tetapi merupakan pondasi yang kuat untuk menjaga integritas dan kredibilitas BUMD di mata publik dan investor



KR-Budiono

Bambang Hariyanto

DPRD Jateng berkewajiban memastikan hal tersebut melalui Peraturan Daerah (Perda). Diperlukan komitmen bersama untuk menciptakan lingkungan BUMD yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dan memberikan manfaat maksimal bagi daerah. Dengan demikian keberadaan

BUMD akan mampu menjadi penopang Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ada sejumlah isu tata kelola dengan mengedepankan sejumlah aspek, yakni transparansi dan akuntabilitas, efisiensi operasional, pengawasan dan pengendalian dan dampak sosial lingkungan. Jika isu tersebut bisa dikelola dengan baik oleh pengelola BUMD, maka akan bisa mendukung pertumbuhan ekonomi di provinsi ini. □-f

(Disampaikan oleh anggota DPRD Jawa Tengah Bambang Hariyanto kepada wartawan KR Biro Semarang Budiono Isman-Anf)